

## PERAN DIPLOMASI HADJI AGUS SALIM DALAM KEMERDEKAAN INDONESIA (1942-1954)

ABD RAHMAN

Program studi Ilmu Sejarah Universitas Jambi.

### Abstrak

Tulisan ini akan memfokuskan pada bahasan tentang peran diplomasi yang dilakukan oleh Hadji Agus salim, menjelang kemerdekaan hingga awal kemerdekaan Indonesia. Tulisan ini dalam uraiannya akan berusaha menggunakan pendekatan *actor oriented*. Pendekatan actor oriented yang membahas penelaahan kepada aktor, yang bertumpu pada tiga hal, yakni; perilaku, Jaringan dan Strategi. Dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, Hadji Agus Salim dikenal sebagai *The founding father*. Hadji Agus Salim ikut menggelorakan pergerakan nasional di Indonesia pada awal abad ke-20, Hadji Agus salim memegang peran vital pada persiapan kemerdekaan Indonesia hingga mengiringi perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan dari kerajaan Belanda dan dunia Internasional akan kemerdekaan Indonesia.

**Kata Kunci: Diplomasi, Hadji Agus Salim, dan Pendekatan Actor Oriented.**

### Abstract

*This paper will focus on the discussion about the role of diplomacy conducted by Hadji Agus salim, before independence until the beginning of Indonesian independence. This paper in its description will attempt to use the actor oriented approach. The actor oriented approach that discusses the study of the actor, which is based on three things, namely; Behavior, Network and Strategy. In the history of Indonesian independence, Hadji Agus Salim is known as The founding father. Hadji Agus Salim joined the national movement in Indonesia in the early twentieth century, Hadji Agus Salim held a vital role in the preparation of Indonesian independence until accompanying the struggle to gain recognition of the sovereignty of the Dutch kingdom and the international world of Indonesia's independence.*

**Keywords: Diplomacy, Hadji Agus Salim, and Actor Oriented Approach.**

### Pendahuluan

Pada hari ulang tahun Hadji Agus Salim yang ke-70, tepatnya pada bulan Oktober 1954, mulailah orang-orang di sekitarnya dan para pengagum Hadji Agus Salim merasa perlu untuk mendokumentasikan sosok Hadji Agus Salim.

Saat itu, dimulai pendokumentasian sosok pemikiran Hadji Agus salim, maka

lahirlah buku 70 tahun Hadji Agus salim.<sup>1</sup>

Kemudian, pada tahun 1961, lahir buku tentang Hadji Agus salim: Hidup dan perjuangannya.<sup>2</sup> Dua puluh tahun kemudian, tepatnya tahun 1981, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional

---

<sup>1</sup> Lih. Panitia Peringatan 70 Tahun Hadji Agus Salim. *Djedjak Langkah Hadji A. Salim, Pilihan Karangan Utjapan dan Pendapat Beliau Dari Dulu Sampai Sekarang*. Djakarta: Tintamas, 1954.

<sup>2</sup> Lih. Solichin Salam. *Hadji Agus Salim Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Djajamurni, 1961.

Proyek Inventarisasi dan dokumen sejarah Nasional, membukukan sosok Haji Agus Salim.<sup>3</sup> Lebih lanjut, dalam memperingati seratus tahun Hadji Agus salim, tepatnya pada tahun 1984 diterbitkan buku berisi komentar dan curahan tentang Hadji Agus salim di mata keluarga dan masyarakat, serta beberapa karangan tersiar beliau di surat kabar.<sup>4</sup> Lalu, Memperingati 50 tahun wafatnya Agus Salim yaitu pada tahun 2004 harian *Kompas* mengadakan diskusi khusus tentang sosok Agus Salim yang kemudian terbit buku dari hasil makalah pada diskusi tersebut.<sup>5</sup>

Tujuh tahun silam yaitu pada bulan Mei 2011 terbit sebuah buku yang berisi tentang kuliah-kuliah Keislaman yang disampaikan oleh Hadji Agus Salim sepanjang tahun 1953, di mana ia mendapatkan kesempatan menjadi dosen tamu pada University Cornell, buku tersebut diberi judul *Pesan-Pesan Islam* dan diterbitkan oleh penerbit Mizan.<sup>6</sup> Selain itu sosok Hadji Agus salim juga dilukiskan dalam beberapa buku kumpulan tokoh-tokoh bangsa Indonesia,<sup>7</sup> dan

beberapa kajian skripsi dan tesis juga banyak mengetengahkan topik tentang sosok Agus Salim.<sup>8</sup> Kenapa sosok Agus Salim begitu penting untuk terus dikaji, apa gerangan yang ada pada dirinya? Jawaban atas dua pertanyaan tersebut menarik untuk terus diteliti, namun yang pasti sosok Hadji Agus Salim selalu memberi inspirasi, dan tidak sekedar itu, sosok Hadji Agus Salim banyak melakoni peran penting dalam menghantarkan kemerdekaan Indonesia. Satu di antara peran yang penting dilakoni hadji Agus Salim adalah sebagai diplomat dalam mengokohkan ikrar kemerdekaan Indonesia.

Tulisan ini akan memfokuskan pada bahasan tentang peran diplomasi yang dilakukan oleh Hadji Agus salim, yang sekaligus membuktikan bahwa dirinya (Hadji Agus salim) mempunyai ketangkasan dalam berfikir dan ketulusan mental yang penuh percaya diri, dua hal yang sulit untuk ditemui pada diri tokoh penggerak bangsa saat ini. Tulisan ini dalam uraiannya akan berusaha

---

<sup>3</sup> Lih. Mukayat. *Haji Agus Salim*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

<sup>4</sup> Lih. Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim. *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

<sup>5</sup> St. Sularto (ed). *Haji Agus Salim (1884-1954) Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2004.

<sup>6</sup> Agus Salim. *Pesan-Pesan Islam*. Bandung: Mizan, 2011

<sup>7</sup> Misalnya buku yang disusun oleh Tamar Djaja tentang *Pusaka Indonesia. Riwayat Hidup*

---

*Orang-Orang Besar Tanah Air*. Djakarta: Bulan Bintang. Cet. Ke-6, 1966. Lalu, Majalah Prisma, Edisi Khusus No 8 Tahun VI, agustus 1977. Dan edisi khusus ini kemudian terbit dalam Taufik Abdullah (ed). *Manusia dalam Kemelut Sejarah*.

<sup>8</sup> Lih. Misalnya, Erni Haryanti Kahfi, *Islam and Nationalism: Agus Salim and Nationalist Movement in Indonesia During the Twentieth Century*. Jakarta: Logos, 2001. Buku saudari Erni tentang Agus Salim ini semula merupakan kajian tesisnya pada McGill University, Montreal, Canada.

menggunakan pendekatan *actor oriented*. Pendekatan actor oriented yang mensorot pada penelaahan kepada aktor, yang bertumpu pada tiga hal, yakni; perilaku, Jaringan dan Strategi. Dengan pendekatan ini akan diarahkan perhatian pada keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku serta perilaku dan tindakan mereka.<sup>9</sup>

### Peran Awal Hadji Agus Salim

Agus Salim yang lahir dari etnik kebudayaan Minangkabau, ia lahir di koto Gadang, IV koto Bukittinggi, Sumatera Tengah, pada tanggal 18 Oktober 1884, dari ibu yang bernama Siti Zainab, dan ayah yang bernama Sutan Salim gelar Sutan Muhammad Salim, seorang *hoofddjaksa* di RIAU. Koto Gadang, tempat lahirnya Agus Salim adalah suatu kampung yang terkenal dengan kaum intelektualnya.<sup>10</sup> Elizabeth Graves dalam bukunya *Asal Usul Elit Minangkabau Modern*, memerinci secara khusus tentang daerah Koto Gadang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana daerah ini pada masa tersebut merupakan daerah yang sangat berkembang minat

pendidikannya.<sup>11</sup> Pada masa inilah Agus Salim lahir dan melewati masa kecil nya di Koto Gadang.

Setelah melewati masa sekolah,<sup>12</sup> ia lalu bekerja sebagai penerjemah, kemudian menjadi pembantu notaris di RIAU. Pada tahun 1905 bekerja pada kongsi mencari arang batu di Reteh Indragiri sampai tahun 1906. Lalu, sejak 1906 hingga tahun 1911 Agus Salim bekerja di konsulat Belanda di Jeddah. Selama lima tahun di tanah Arab inilah, di samping sempat menunaikan ibadah Haji, beliau mempelajari juga agama Islam.<sup>13</sup> Semenjak itulah nama beliau dikenal dengan sebutan *Hadji* agus Salim, langka saat itu bagi tokoh-tokoh pergerakan yang telah menunaikan ibadah Haji, dan untuk lebih menghormati usia beliau yang lebih tua, maka pada saat itu ia lebih disebut sebagai *Hadji* Agus salim.

Deliar Noer menuliskan bahwa Perjalanan hidup Agus Salim seakan diatur oleh Tuhan, karena memang nasib yang membawanya ke Jazirah Arab, tempat ia bekerja pada konsulat Belanda di Jeddah. Di sini ia memperoleh kesempatan untuk

---

<sup>9</sup> Ahimsa-Putra, H.S. Kajian Patron-Klien: Dari Fungsional-Struktural ke Actor Oriented. Dalam *Patron & Klien di Sulawesi Selatan Sebuah kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press, 2007

<sup>10</sup> Solichin Salam. *Hadji Agus Salim Hidup dan Perjuangannya*. Jakarta: Penerbit Djajamurni, 1961, hlm. 32.

---

<sup>11</sup> Elizabeth Graves. *Asal-Usul Elit Minangkabau Modern. Respons terhadap kolonial Belanda abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan obor, 2007, hlm. 252-270.

<sup>12</sup> Mula-mula Agus Salim menempuh pendidikannya pada sekolah E.L.S. (Europeesche Lagere School) dan tamat pada tahun 1898. Kemudian melanjutkan pelajarannya ke H.B.S (Hogere Burgerschool) di Djakarta 5 tahun lamanya, tamat pada tahun 1903.

<sup>13</sup> Solichin Salam. *Hadji Agus Salim*, hlm. 36

belajar bahasa Arab dan Islam dengan tekun. Adalah juga nasib yang membawanya ke lingkaran Sarekat Islam.<sup>14</sup> Tahun 1912, di kota kelahirannya Koto Gadang, Sumatera Barat, ia mendirikan HIS (Hollandsch Inlandsche School), yang diasuhnya sampai tahun 1915.<sup>15</sup> Karir politiknya dimulai di Sarikat Islam. Pada tahun 1919 Agus Salim mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh bersama Semaun. Organisasi ini menuntut Pemerintah Belanda agar di Indonesia segera didirikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sesungguhnya.

---

<sup>14</sup> Deliar Noer membagi perkembangan sarekat Islam dalam empat bagian, yaitu: Periode pertama, dari 1911 sampai 1916 yang memberi corak dan bentuk bagi partai tersebut, kedua, dari 1916 sampai 1921 yang dapat dikatakan merupakan periode puncak; ketiga, dari 1921 sampai 1927, periode konsolidasi. Dalam periode ini partai tersebut bersaing keras dengan golongan komunis, di samping juga mengalami tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah Belanda. Dan keempat, dari 1927 sampai 1942, yang memperlihatkan usaha partai untuk tetap mempertahankan eksistensinya di forum politik Indonesia. Agus Salim berhubungan dengan organisasi ini mulai pada tahun 1915 sebagai seorang 'anggota seksi politik dari kepolisian'. Oleh penyelidikan itu ia menjadi berkenalan betul dengan pergerakan SI, istimewa dengan pemimpinnya Tjokroaminoto, dan sampai menyebabkan pula ia masuk dalam SI. Sesudah masuk itu ia memutuskan perhubungan dengan polisi. Ia tidak populer dalam periode pertama sarekat Islam, tetapi ia berhasil untuk mencapai suatu kedudukan kepemimpinan dalam periode-periode berikutnya, terutama dalam membentuk dan memberi isi pada sarekat Islam dengan warna Islamnya. Lih. Deliar Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, Cet kedelapan Mei 1996, hlm. 114-170.

<sup>15</sup> Majalah Gatra Edisi Khusus Hari Kemerdekaan, Tokoh Lintas Agama Perumus Indonesia. Agustus 2012, hlm 58

Kemudian Hadji Agus Salim mempunyai banyak murid dan pengikut yang belajar di sekolah-sekolah Belanda, termasuk di dalamnya anggota dan pemimpin Jong Islamiteten Bond. Banyak di antara pemimpin JIB ini yang menjadi pewaris kepemimpinan umat Islam dalam bidang politik sesudah Indonesia merdeka.<sup>16</sup> Sebagai seorang ahli dalam agama Islam, Hadji Agus Salim menjelaskan kepada para pemuda bersangkutan hubungan Islam dan Politik, khususnya bentuk masyarakat yang dikehendaki oleh Islam. Sesuai suasana ketika itu, lingkungan sarekat Islam (SI) banyak menambahkan pro dan kontra tentang paham sosialisme, malah menyebabkan akhirnya Sarekat Islam pecah. Bagi Hadji Agus Salim, Islam menghendaki terbinanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang berpangkal pada persamaan tetapi juga kesempatan untuk maju bagi mereka yang berusaha; suatu masyarakat yang juga tolong menolong dan menjauhkan diri dari eksploitasi sesama manusia. Tetapi segalanya ini dikaitkan Salim dengan pengabdian diri kepada Allah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983, hlm. 13

<sup>17</sup> Lebih lanjut lihat Noer, *Gerakan Modern Islam*, hlm. 136-142. Oleh karena hangatnya persoalan ini, Tjokroaminoto menulis dan menerbitkan buku *Sosialisme dan Islam* tahun 1921.

Oleh karena penahanan atas Tjokroaminoto dan pemimpin lain yang disangka tersangkut dalam proses itu, maka pimpinan SI diambil alih oleh Haji Agus Salim dan Abdul Muis. Pada masa itu anggota-anggota SI bercampur baur dengan anggota-anggota yang sudah lama menganut paham-paham komunis biarpun mereka masih terhitung kaum mudanya saja seperti Alimin, Muso, Semaun, dll. Oleh karena itu wajarlah pendapat dan pemikiran Haji Agus Salim yang mementingkan disiplin dalam partai sebab jika tidak diadakan disiplin partai maka SI akan hancur dari dalam oleh pembauran yang sudah terbawa paham komunisme dari kaum muda yang beraliran radikal itu. Setelah diperdebatkan, kongres memerintahkan formulasi disiplin partai itu. Maka secara otomatis orang yang menjadi anggota SI tetap berafiliasi dengan komunis ketika itu, keluar dan mendirikan SI merah, yang dipelopori oleh Semaun dari Semarang.<sup>18</sup>

### **Peran Hadji Agus Salim Menjelang Proklamasi Kemerdekaan**

Pada tahun 1942 Hadji Agus Salim diminta untuk bekerja pada suatu instansi militer, letak kantornya di kompleks “Oka Dai 1602 Butai” dahulunya sebuah tangsi

militer KNIL, Batalyon 14 di Bogor.<sup>19</sup> Di dalam kompleks ini diadakan pendidikan atas sejumlah pemuda Indonesia dan Hadji Agus salim ditempatkan pada bagian yang bertugas menyiapkan dan menerjemahkan bahan pendidikan kemiliteran untuk keperluan para calon opsir Peta (Pembela Tanah Air) yang ketika itu sedang dipersiapkan.<sup>20</sup>

Menjelang tibanya saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hadji Agus Salim ditunjuk sebagai anggota “Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai” (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang dibentuk pihak Jepang, di mana terhimpun tenaga-tenaga pemimpin pergerakan rakyat Indonesia. Badan itu diketuai oleh Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat, sedang ketua mudanya ialah R. Pandji Suroso dan Itibangase Yosio.<sup>21</sup> Sidang pertama khusus

---

<sup>19</sup> Pimpinan kantor tersebut yang bernama Kapten Yamasaki adalah seorang guru sebelum ia memasuki dinas militer. Orangnya lebih muda dari Agus Salim dan hanya bisa berbahasa Jepang saja. Namun demikian antara kedua orang ini kemudian terjalin hubungan yang baik juga dan dapat melakukan tugas sebagai satu tim yang saling menghargai.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 85.

<sup>21</sup> Anggota lengkap dari lembaga ini terdiri dari : Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, M. Soetardjo Kartohadikusumo, Dr. Buntaran Martoatmodjo, Sukardjo Wirjopranoto, Mr. J. Latuharhary, Mr. Suwandi, Mr. Wongsonegoro, Mr. R. Sastromulyono, Mr. Sartono, Mr. Moh Yamin, Hadji Agus Salim, K.H.M. Mansjur, Dr. Soekiman Wirjosandjoyo, Ki Bagus Hadikusumo, A.R. Baswedan, K.H. Masjkur, K.H. Abd Kahar Muzakkir, K.H. Wahid Hasjim, P.F. Dahler, Otto Iskandardinata, Abdul Kadir, Dr. Syamsi, Mr. A.A. Maramis, Mr. R. Syamsudin, Dr. R. Kusumaadmojo, Abdul Rahim Pratalikrama, R. Azis, BPH Bintoro, P.B.H.

---

<sup>18</sup> Adam Malik, dalam sambutan terhadap buku seratus tahun hadji Agus Salim, sinar harapan 1984, hlm 13.

membahas dasar Negara. Pada sidang ini terdapat dua kelompok yang pertama menghendaki Dasar Negara Islam, sedangkan kelompok yang kedua menghendaki dasar negara Kebangsaan. Pada tanggal 1 Juni hari terakhir dari rapat pertama ini Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya tentang dasar Negara yang terdiri dari lima sila dan diberi nama pancasila. Dalam sidang kedua dibahas rancangan Undang Undang Dasar. Sidang ini dibagi dalam tiga panitia, yakni Panitia perancang Undang Undang Dasar diketuai oleh Ir. Soekarno; Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso dan Panitia Perekonomian serta keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta. Hadji Agus Salim termasuk anggota yang bertugas merancang Undang-Undang Dasar di bawah pimpinan Ir. Soekarno. Panitia Perancang Undang Undang dasar ini kemudian membentuk panitia kerja yang diketuai oleh Mr. Soepomo dan

terdiri dari tujuh orang termasuk sebagai anggotanya ialah Haji Agus Salim. Tidak hanya itu, Hadji Agus salim juga diserahi tugas sebagai panitia penghalus bahasa, yang terdiri dari tiga orang, yakni Mr. Soepomo, Haji Agus Salim dan Husein Jayadiningrat.<sup>22</sup>

Ketika pekerjaan BPUPKI telah selesai maka persoalan kemerdekaan Indonesia telah meningkat kearah pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI dibubarkan tanggal 6 agustus 1945 sedangkan PPKI anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari seluruh Indonesia yang diangkat oleh pucuk pimpinan pemerintahan Dai Nippon di wilayah selatan dengan tempat sidang ditetapkan di Jawa. PPKI diketuai oleh Ir. Soekarno diwakili oleh Drs. Moh Hatta dan direncanakan mulai bekerja pada tanggal 19 Agustus 1945. Tetapi karena perubahan zaman dan penyerahan Jepang tanpa Syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 diteruskan dengan proklamasi berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal itu juga disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang terkenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945.

---

Purubaya, R.A.A. Wiranatakusuma, Ir. R. Ashar Sutejamanandar, Oey Tiang Chu, Ui Tjong How, R.M. Margono Joyohadikusumo, K.H.Abdul Halim, Sudirman, Prof.Dr.Husein Jayadiningrat, Prof.Mr. Soepomo, Prof.Ir.Roseno, Mr. Panji Singgih, Mr. Ny. Maria Ulfa Santosa, R. M.Suryo, R. Roslan Wongsokusumo, Mr. R. Susanto Tirtoprojo, Ny. Sunaryo Mangunpuspita, Liem Kun Hian, Mr.R. Hendromartono, H. Sanusi, A.M.Dasaat, Mr. Tan Eng Ho, Drs. Kusumosrodiningrat, Ir. R. M. P.Surahman Tjokrodisuryo, R.A.A. Sumitro Kulupaking Purbanagoro, K.R.M.T.H. Wuryaningrat, Mr. A. Subardjo, Prof. Dr. R. Zaenal Asikinwijayakusuma, Abikusno Cokrosuyoso, dan Parada Harahap. Lih. Mukayat. *Haji Agus Salim*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981, hlm 60-61

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 61



Kecuali itu dipilih pula Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Drs. Moh Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pada tanggal 25 September 1945 presiden mengangkat anggota-anggota Dewan Pertimbangan agung yang berjumlah 11 orang, antara lain ialah: Radjiman Widyodiningrat, Syed Jamil Jambek, Hadji Agus Salim, Wuryaningrat, H. Adnan, Margono Joyohadikusumo, Mohammad Enoch, Dr Latumeten, Ir. Pangeran Moh. Nur, Dr Sukiman Wiriyosanjoyo dan Ny. Suwarni Pringgodigdo. Sebagai anggota Dewan pertimbangan Agung inilah karir pertama Hadji Agus Salim dalam pemerintahan Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan, namun jabatan ini tidak lama ia emban karena ia diangkat sebagai menteri muda luar negeri dan terus sebagai menteri luar negeri Republik Indonesia. Pada masa menjadi menteri luar negeri inilah Agus Salim kembali menunjukkan kepiawaiannya yang sangat cemerlang, ia boleh dikatakan punya "saham" atas keluarnya bangsa Indonesia dengan selamat tetap sebagai bangsa merdeka, setelah tahun 1947-1949, Republik Indonesia kembali "diganggu" oleh kaum imperialisme dan kolonialisme yang hendak terus menjajah bangsa Indonesia. Uraian selanjutnya dalam tulisan ini akan berkisah tentang peran Agus Salim sebagai menteri luar negeri yang sekaligus ia

menunjukkan kepiawaiannya dalam berdiplomasi menghadapi dunia luar.

### **Peran Diplomasi Hadji Agus Salim Awal Kemerdekaan (1946-1949)**

Menurut keterangan Adam Malik, nama Haji Agus Salim pertama kali menonjol di luar negeri ketika diadakan konferensi buruh sedunia di Jenewa pada tanggal 30 Mei 1929. Pemerintah kolonial mengirimkan dua orang utusan ke konferensi ini, pertama Haji Agus Salim untuk bergabung dengan delegasi buruh Nederland dan Achmad Djajadiningrat bergabung dalam delegasi Belanda sebagai ahli (Teknis). Mulai saat itu nama Agus Salim dikenal di dalam pergaulan internasional, yang oleh pemerintah kolonial berusaha ditutup-tutupi aktivitas bangsa Indonesia dan kesanggupannya.<sup>23</sup>

Cita-cita Indonesia merdeka terwujud dalam proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan Hukum Internasional, dengan adanya proklamasi oleh bangsa Indonesia tersebut berarti telah terbentuknya negara berdasarkan hak bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan proklamasi kemerdekaan itu berarti bahwa bangsa Indonesia menyatakan secara sepihak telah melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Belanda dan mengambil nasibnya di tangannya sendiri. Dengan proklamasi itu bangsa Indonesia membentuk organisasi

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 15

kekuasaan yang berdaulat. Akibat proklamasi tersebut di atas maka berdasarkan Hukum Internasional tersebut telah terjadi perubahan-perubahan. Pertama-tama, perubahan menyangkut perubahan siapa yang berdaulat. Sebelum proklamasi yang berdaulat adalah kerajaan belanda, sedangkan setelah proklamasi yang berdaulat adalah RI.<sup>24</sup>



(Presiden Soekarno, Wapres Mohammad Hatta dan Hajdi Agus Salim).

Pemerintah Republik Indonesia yang awalnya berpusat di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1946 pindah ke Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena keadaan di Jakarta tidak aman, sedangkan Yogyakarta dianggap lebih aman. Sebelumnya pada tanggal 3 November 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden yang isinya pencabutan diadakan gerakan Rakyat Nasional yang disebut

Partai Nasional Indonesia dan sebagai penggantinya dianjurkan pembentukan partai-partai dengan tujuan menghindarkan pertumbuhan keditaktoran. Akibat dari lahirnya partai-partai yang seperti jamur dimusim hujan itu mengakibatkan timbulnya kabinet parlementer pertama dengan Sutan Syahrir sebagai perdana Menteri.

Pada kabinet Syahrir I Hadji Agus salim tidak duduk dalam jajaran kabinet, ia ditugasi saat itu sebagai penasihat menteri luar negeri Ahmad Subardjo, sebagai menteri luar negeri pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaannya. Baru, pada kabinet Syahrir II yang dibentuk pada tanggal 12 Maret 1946 Agus salim ditunjuk sebagai menteri luar negeri muda, dengan sutan syahrir yang langsung merangkap jadi menteri luar negeri. Kabinet Syahrir II ini diberi mandat kekuasaan yang jelas oleh KNIP dalam sidangnya yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 2 Maret 1946. Mandat ini meliputi: (1) mengadakan perundingan dengan para penguasa Belanda atas dasar pengakuan penuh kedaulatan RI, (2) menyiapkan pembelaan bagi RI, (3) menyusun suatu dasar demokratis untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan tingkat propinsi, (4) menyelenggarakan pengadaan produksi secara maksimum dan pembagian barang-barang secara adil, dan (5) menjalankan

<sup>24</sup> Agustinus Supriyanto. *Pengakuan Kerajaan Belanda Dalam Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia Tahun 1945-1949*. Disertasi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum UGM. Agustus 2007, hlm. 51-52



perkebunan dan industri penting dengan pengawasan pemerintah.<sup>25</sup>

Oleh karena, dibutuhkannya pengakuan kedaulatan terhadap RI atas kerajaan Belanda, maka dimulailah sejumlah perundingan. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan perundingan Linggajati.<sup>26</sup> Dari tanggal 22 Oktober 1946 hingga 15 November 1946 diadakan Sepuluh Tahap perundingan linggarjati.<sup>27</sup> Isi perjanjian linggarjati pada

---

<sup>25</sup> Agustinus Supriyanto. *Pengakuan Kerajaan Belanda Dalam Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia Tahun 1945-1949*. Disertasi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum UGM. Agustus 2007, hlm. 117-118

<sup>26</sup> Pilihan atas tempat pertemuan jatuh pada Cirebon yang terletak sama tengah antara Batavia dan Yogyakarta. Pembicaraan dapat dilakukan di daerah pegunungan linggajati di dekat kota pelabuhan.

<sup>27</sup> Perundingan I (22 Oktober 1946) delegasi Belanda mengajukan konsep penyelesaian masalah dengan menjadikan Indonesia sebagai “tuan rumah di rumah sendiri”. Dengan demikian dapat diketahui dalam perundingan I kesan negatif Republik terhadap delegasi Belanda dapat diubah. Perubahan kesan ini dapat menjadi modal dalam perundingan berikutnya. Perundingan II (24 Oktober 1946) Dalam perundingan II ini Belanda mengusulkan dua hal. Pertama, Bangsa Indonesia harus menjadi tuan rumah dalam rumah sendiri. Kedua, Bangsa Belanda dan Bangsa Indonesia harus bekerja sama seerat mungkin. Perundingan III (1 Nov 1946) Gagasan membentuk perjanjian internasional ditolak oleh pihak Belanda. Gagasan ini menimbulkan kesan pengakuan *de jure* atas Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada perundingan III ini pihak Belanda masih ragu untuk merumuskan suatu pengakuan *de jure* yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini menunjukkan rupanya Belanda mencoba mengulur-ulur waktu dalam pemberian pengakuan *de jure* ini. Perundingan IV (4 November 1946) Sebagai bahan perundingan dan pertemuan ini ada tiga macam. Pertama, konsep perjanjian dari delegasi Indonesia. Kedua, memorandum Belanda yang tidak mengalami perubahan. Ketiga, naskah komisar Jenderal yang terakhir. Dengan demikian dapat diketahui bahwa walaupun Belanda menolak

intinya, berisi: Belanda mengakui secara *de facto* wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Dengan demikian, proses berlangsungnya pembuatan perjanjian Linggajati itu sendiri sudah merupakan pengakuan *de facto* Kerajaan Belanda terhadap Indonesia.

Sesudah dua hari membicarakannya di bulan November 1946 kabinet memutuskan memberikan kuasa kepada delegasi RI untuk menandatangani perjanjian linggajati dan kabinet berpegang teguh kepadanya. Hatta

---

perumusan suatu perjanjian internasional, Belanda menghormati konsep perjanjian yang dirumuskan oleh Republik. Sebaliknya Republik bersedia membicarakan memorandum usulan Belanda. Sebagai pembanding kedua delegasi menggunakan naskah ketiga dari Komisar Jenderal. Hal ini menunjukkan sikap resiprokal dari kedua delegasi. Perundingan V-X (11-16 November) Pembahasan Naskah perjanjian. Dalam pembahasan naskah perjanjian ini baik delegasi Indonesia dan Belanda mengajukan usulan perubahan rumusan-rumusan. Dalam sidang resmi yang diadakan tanggal 11 dan 12 November kedua belah pihak membicarakan rancangan persetujuan berdasarkan daftar pasal-pasal yang disusun oleh pihak Belanda, dan untuk sementara menyingkirkan perbedaan pendapat diantara mereka. Agustinus Supriyanto. *Pengakuan Kerajaan Belanda Dalam Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia Tahun 1945-1949*. Disertasi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum UGM. Agustus 2007, hlm. 194-196

menyatakan di hadapan seribu mahasiswa di Yogyakarta tanggal 3 Desember 1946 bahwa perjanjian linggajati itu harus dipandang sebagai saat istirahat dan batu loncatan menuju tahap perjuangan berikutnya untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang mencakup seluruh Hindia Belanda dahulu. Jadi, pembatasan atas kedaulatan yang disetujui oleh delegasi RI itu bersifat sementara dan berguna menghimpun kekuatan.<sup>28</sup>

Sementara itu, Agus Salim selaku menteri luar negeri muda pada saat itu tanggal 23 maret 1947 menghadiri konferensi Hubungan Antar-Asia (Inter-Asian Relations Conference) di New Delhi, India. Ketika itu, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah menjadi sangat populer di India dan mendapat bantuan dan sokongan yang amat meriah dari partai-partai dan rakyat India. Delegasi Republik Indonesia yang beranggotakan 30 orang dan diketuai oleh Dr. Abu Hanifah,<sup>29</sup> Agus Salim pada saat itu bertindak sebagai penasehat delegasi.

---

<sup>28</sup> Agustinus. *Ibid.*, hlm 134

<sup>29</sup> Abu Hanifah lahir di Padangpanjang Sumatera barat, tahun 1906. Menyelesaikan pendidikan di Stovia (sekolah Tinggi Kedokteran) Jakarta tahun 1932, kemudian melanjutkannya ke *Geneeskundige Hogeschool* (1932-1938). Sejak 1932 aktif bekerja sebagai dokter di dalam dan luar negeri dan di masa revolusi (1945-1950) turut aktif dalam BKR, serta menjadi ketua Fraksi Masjumi di KNIP.

Dalam pengakuan B. A Ubain dan Mohammad Moein,<sup>30</sup> menyatakan:

“ Delegasi disambut dengan meriah di lapangan terbang Palm di New delhi. Pak Haji Agus Salim yang bertubuh kecil, berjenggot putih, berpeci khas dan berusia lanjut itu menarik perhatian masyarakat India karena beliau lincah dan aktif dan suka bergaul dengan siapa saja. Beliau menguasai banyak bahasa asing, seperti inggris, perancis dan arab, dan pintar membicarakan segala sesuatu, dari soal politik, ekonomi dan sosial hingga sampai kepada pengobatan timur tradisional dengan gaya yang mudah dimengerti oleh si pendengarnya. Selama berada di New Delhi sampai akhir konperensi tanggal 1 april 1947, beliau aktif bertemu dan bertukar pikiran dengan pimpinan pemerintah India (yang masih bersifat interim), pemimpin-pemimpin dari Indian National Congress dan All-India Muslim League, seperti Pandit Jawaharlal Nehru dan Muhammad Ali Jinnah.<sup>31</sup>

Sesudah konferensi, Agus Salim meneruskan perjalanan ke Mesir sebagai ketua Misi Republik Indonesia ke Timur Tengah. Misi itu berangkat melalui Bombay di mana beliau dan anggota misi dijamu makan siang oleh Sayeed Abdul Munim Zawawi, seorang hartawan Arab dari Oman yang simpatik terhadap dan menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Misi berangkat bersama-sama dengan konsul Jenderal Mesir di Bombay, Mohammad Abdul Munim. Mereka sampai di Mesir tanggal 19 April 1947.

Missi diplomatik RI yang di pimpin H. Agus salim ke beberapa negara Arab,

---

<sup>30</sup> B.A Ubain dan Mohammad Moein pada tahun 1947 tersebut dipercaya menjalankan tugas sebagai ketua dan sekretaris Jenderal dari PPII (Panitia Perjuangan Kemerdekaan Indonesia) di India, yang bertindak sebagai perwakilan de facto dari Republik Indonesia.

<sup>31</sup> B.A.Ubain dan Mohammad Moein. Konperensi Hubungan Antar-Asia. Dalam Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim. *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984., hlm. 157-158.

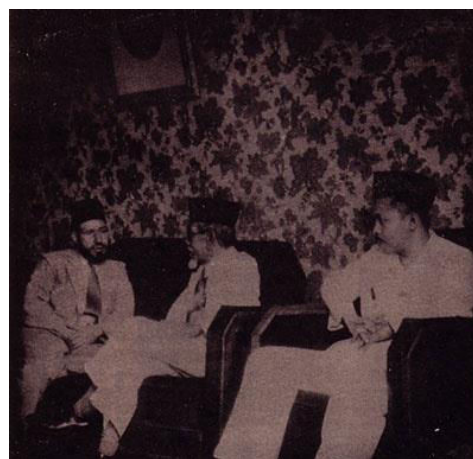
beranggotakan juga Muhammad Rasyidi, Nazir Pamuntjak, Abdul Kadir dan A.R. Baswedan. Akibat usaha ini negara-negara Islam mengakui Republik Indonesia secara de jure. Pada tanggal 10 Juni 1947 Haji Agus Salim menandatangani persahabatan antara Republik Indonesia dan Mesir di Kairo. Perjanjian persahabatan ini ditandatangani oleh Haji Agus Salim sebagai wakil Republik Indonesia, sedangkan pihak Mesir ditandatangani oleh M.F. Nokrasyi sebagai wakil dari pemerintahan Mesir. Mesir juga mengadakan perjanjian perdagangan dengan Indonesia.



(Agus Salim bersama AR Baswedan, saat berada di Timur Tengah).

Delegasi Republik Indonesia kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Republik Siria. Perjanjian diplomatik dengan suriah itu juga mengakui secara de jure adanya Republik Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 2 Juli 1947. Republik Siria diwakili oleh Jamil Mardam Bey sebagai Menteri Luar Negeri

Suriah. Perjanjian dengan Siria ini persis seperti perjanjian RI-Mesir, hanya tidak ada perjanjian tentang perdagangan.<sup>32</sup> Upaya-upaya misi diplomatik ini dibutuhkan dalam kenyataan Republik yang masih muda ini memerlukan bukan hanya perlawanan bersenjata, namun sekaligus perjuangan diplomasi untuk memenangkan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.<sup>33</sup>



(Haji Agus Salim bersama Hasan Al-Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin Mesir).

Pada waktu dibentuk kabinet baru pada tanggal 3 Juli 1947 oleh Amir

<sup>32</sup> Mukayat. *Hadji Agus Salim.*, hlm 70

<sup>33</sup> Berkaitan dengan kedaulatan ini, Hans Kelsen mengatakan bahwa persamaan dan kedaulatan sebagai hak fundamental negara (*equality and sovereignty as fundamental rights of the state*). Memang kedaulatan merupakan bagian integral dari persamaan derajat dan integritas wilayah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerjasama internasional selalu dan di manapun tergantung pada pengakuan atas prinsip kedaulatan ini. Tanpa adanya pengakuan prinsip kedaulatan ini hubungan internasional tidak mungkin dijalankan. Lih. Agustinus Supriyanto. *Pengakuan Kerajaan Belanda Dalam Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia Tahun 1945-1949*. Yogyakarta: Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum UGM, 2007, hlm. 25

Sjarifuddin sebagai perdana Menteri, Haji Agus Salim ditunjuk sebagai menteri luar negeri. Sementara Amir Sjarifuddin melaksanakan tugasnya di dalam negeri, Haji Agus Salim menjalankan tugasnya ke Suriah, Irak dan Lebanon. Beliau sampai di Damaskus (Suriah) pada tanggal 6 Juli 1947 dan di Baghdad pada tanggal 16 Juli. Melalui Surat No. 155/L tanggal 7 Agustus 1947 Haji Agus Salim menyampaikan kepada kerajaan Mesir keberlangsungan tugas Delegasi RI untuk negara-negara Arab sebagai berikut. Mohammad Rasyidi ditugaskan sebagai Charge d'Affaires, M. Nazir Pamuncak sebagai Counsellor, Mohammad Zein Hassan sebagai sekretaris I, dan Mansur Abu Makarim sebagai sekretaris II. Mereka menjadi staf kedutaan RI pada tingkat Charge d'affaires di Kairo. Ini merupakan kedutaan RI yang pertama dibuka di luar negeri semenjak proklamasi. Staf ini juga merangkap sebagai misi diplomatik RI tetap untuk negara-negara anggota Liga Arab. Dari segi hukum Internasional ini mengandung makna bahwa Arab Saudi mengakui secara de facto eksistensi RI.<sup>34</sup> Kunjungan Agus Salim ke Irak pada saat itu belum menghasilkan pengakuan dari Irak atas kemerdekaan Indonesia, sedangkan usahan

Libanon berhasil, Libanon mengakui de jure Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Berhubung pada tanggal 12 Agustus akan diadakan sidang Dewan Keamanan guna membicarakan sengketa antara Indonesia dan Belanda, maka pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan agar mengizinkan Menteri Luar Negeri RI Haji Agus Salim dan penasihatnya St. Syahrir untuk menghadiri persidangan guna memberikan keterangan-keterangan seperlunya.<sup>36</sup> Dalam persidangan itu setelah diadakan pemungutan suara dengan berkesudahan 8 setuju dan 3 tidak setuju, maka wakil-wakil Indonesia diperkenankan mengikuti sidang Dewan Keamanan. Delapan Negara yang menyetujui tadi adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Polandia, Australia, Cina, Siria, Kolombia dan Brazilia. Sedangkan tiga negara yang tidak setuju ialah Inggris, Perancis dan Belgia.

Dalam sidang Dewan Keamanan ini dibicarakan pembentukan sebuah komisi yang akan dikirimkan ke Indonesia atas usul Australia. Wakil Belanda sangat menentang bila wakil Republik Indonesia

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 214-215

---

<sup>35</sup> Mukayat. *Hadji Agus Salim.*, hlm 70

<sup>36</sup> Setelah mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan sesudah Belanda melancarkan agresi Militer I, Sjahrir diutus sebagai wakil RI di DK PBB oleh pemerintah baru pimpinan Amir Sjarifuddin. Kedudukan dan pengalaman diri sebelumnya, menjadikan Sjahrir sebagai wakil yang tepat di Lake Success.

diberi kesempatan memberikan keterangan-keterangan dalam sidang dewan keamanan. Tetapi Amerika Serikat mengatakan bahwa justru Republik Indonesia perlu memberikan penjelasan. Tanggal 14 Agustus 1947 Sutan Syahrir diberi ijin untuk pertama kali memberikan keterangan tentang keadaan di Indonesia selaku duta Republik Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan ini.<sup>37</sup>

Akhirnya Dewan Keamanan menentukan dua keputusan yaitu; *pertama*, konsul-konsul Jenderal di Jakarta supaya memberikan laporan tentang pelaksanaan gencatan senjata di Indonesia serta menyebutkan pihak mana yang tidak menaati peraturan tersebut dan apa alasannya mereka berbuat demikian. *Kedua*, Baik Belanda maupun Republik Indonesia memilih negara ketiga untuk menjadi perantara dalam penyelesaian antara sengketa Indonesia-Belanda. Akibat keputusan Dewan keamanan ini maka pada tanggal 6 September 1947 kabinet Amir Syarifuddin atas usul Haji Agus Salim meminta agar Australia bersedia menjadi

anggota komisi Tiga negara atau KTN, sedangkan Belanda memilih Belgia sebagai negara ketiga. Pada tanggal 19 September 1947 Australia dan Belgia menunjuk Amerika Serikat sebagai negara penggenap dari komisi tiga Negara.<sup>38</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 1947 anggota KTN datang di Indonesia. Dua hari kemudian mereka menuju Yogyakarta dalam usaha berunding dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan itu diputuskan bahwa perundingan Indonesia-belanda yang diawasi oleh KTN akan diadakan di tempat netral yang disetujui oleh kedua belah pihak. Akhirnya diputuskan bahwa perundingan diadakan di kapal perang *renville*, kemudian perundingan ini dikenal dengan sebutan perundingan *Renville*. Perundingan *Renville* dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Ali Sastroamijoyo, Dr. Coa si Kien, Mr. Mohd. Roem, Haji Agus Salim, Mr. Nasrun dan Ir. Juanda. Sedangkan wakil-wakil Belanda terdiri dari Van Vredenburg, Abdulkadir Wijoatmojo, Dr. Sooumokil, Pangeran Kertanegara dan Zulkarnaen.<sup>39</sup>

Perundingan *Renville* berakhir pada tanggal 17 Januari 1948 dan menelorkan perjanjian *Renville* yang ditandatangani oleh Abdul Kadir

---

<sup>37</sup> Pada tanggal 15 Agustus wakil pemerintah Belanda membantah keterangan Syahrir dan menyalahkan Dewan Keamanan. Tangkisan syahrir diucapkan pada sidang Dewan Keamanan tanggal 17 agustus 1947. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1947 sekali lagi wakil Belanda menuduh Dewan Keamanan menyerahkan berjuta-juta rakyat Indonesia kepada Republik yang bukan negara yang sah. Tetapi tuduhan Belanda ditolak oleh Syahrir pada tanggal 26 Agustus 1947, malahan Syahrir meminta kepada Dewan Keamanan untuk mengrimkan Komisi Internasional guna mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.

---

<sup>38</sup>Mukayat. *Haji agus Salim.*, hlm. 74

<sup>39</sup> *Ibid.*,



Wijoyoatmojo sebagai wakil Belanda sedangkan pemerintah Negara Republik Indonesia diwakili oleh Mr. Amir Syarifudin. Di antara putusan perjanjian Renville menyatakan baik tentara Belanda maupun Indonesia harus ditarik mundur di belakang garis demarkasi, yaitu daerah kosong (daerah tidak bertuan) dan biasanya disebut daerah/garis status quo. Garis demarkasi itu merupakan batas daerah yang diduduki oleh tentara Belanda di satu pihak dan pemerintah Indonesia di lain pihak, sesuai dengan proklamasi pemerintah Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947. Dalam perundingan Renville ini komisi Tiga negara memberikan sumbangan tentang prinsip tambahan di dalam usaha menyelesaikan politik terutama mengenai soal prosedur pembentukan negara Indonesia serikat dan pemerintahan dalam masa peralihan.<sup>40</sup>

Perjanjian Renville tidak membawa kebahagiaan bagi negara Republik Indonesia dan pemerintahannya. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, maka partai Masyumi dan PNI mencabut wakil-wakilnya yang duduk dalam kabinet Amir Syarifuddin. Kedua partai itu yang ikut serta bertanggungjawab atas adanya perundingan Renville, tetapi pada akhirnya malahan membubarkan kabinetnya sendiri. Akibatnya karena kegawatan situasi dalam

pembentukan kabinet, maka Presiden Sukarno menunjuk wakil presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet presidensial. Kabinet Hatta yang pertama ini terdiri dari 17 kementerian. Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dijabat oleh Hatta sendiri. Sedangkan jabatan Menteri luar negeri dipercayakan kepada Haji Agus Salim. Meskipun kabinet sudah diganti ternyata suasana di dalam negeri semakin bertambah keruh dengan timbulnya pemberontakan PKI di Madiun pada bulan September 1948 yang dapat dipadamkan oleh Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Oktober 1948. Belanda melihat kesempatan ini, maka dengan segera mengadakan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.<sup>41</sup>

Setelah meletusnya agresi yang kedua ini, yang dimulai dengan serangan Belanda secara mendadak berhasil menduduki pangkalan udara Maguwo. Pendaratan tentara payung di pangkalan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 74-75

---

<sup>41</sup> Akibat Agresi militer Belanda yang pertama yang ditutup dengan persetujuan Renville, maka wilayah Republik Indonesia menjadi sempit lagi. Pengakuan *de facto* atas Sumatera, Jawa dan Madura seperti yang tercantum dalam persetujuan Linggajati merupakan khalayan Belanda Blokade Belanda yang sangat kuat menambah kesulitan dalam kehidupan perekonomian rakyat. Peristiwa Madiun menambah kemelaratan rakyat yang sudah tidak tertahan lagi. Persediaan padi dan bibit habis dibakar. Perekonomian rakyat morat-marit dan masyarakat Indonesia terpecah belah dalam pelbagai golongan yang saling membenci. Perpecahan itu menimbulkan kerugian nasional dalam perjuangan menghadapi lawan dan merupakan kerugian sosial karena golongan-golongan yang ada saling bertentangan.

udara maguwo tidak mengalami perlawanan yang berarti. Pendaratan itu dilakukan jam 02.00 malam hari. Perjalanan menuju ke kota Yogyakarta juga hanya mengalami perlawanan kecil-kecilan, hal ini disebabkan karena Tentara Republik Indonesia sengaja mengundurkan diri ke luar kota. Pada jam 16.00 kota Yogyakarta telah diduduki oleh Belanda. Tentara Republik Indonesia mengundurkan diri dari kota, bersiap-siap untuk melakukan perang gerilya. Pada waktu itu para pemimpin Republik Indonesia yang berada di kota Yogyakarta sedang membicarakan situasi politik, di Istana Presiden. Diputuskan dalam sidang itu untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera yang akan dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiranegara, yaitu kemakmuran yang sedang mengadakan perjalanan di Sumatera.<sup>42</sup>

Mandat Presiden kepada Mr. Safruddin itu ditandatangani oleh Dwi Tunggal Sukarno-Hatta. Diantara bunyi mandat itu sebagai berikut: “Kami Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah menyerang ibukota. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat

menjalankan kewajibannya lagi, maka kami menugaskan dan menguasai kepada Mr. Safrudin Prawiranegara, Menteri kemakmuran republik Indonesia unruk membentuk pemerintahan Republik Darurat di Sumatera”. Dikawatkan pula pada dr. Sudarsono, Palar dan Mr. A.A Maramis di New Delhi untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di India, bila ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara tidak berhasil. Instruksi ini ditandatangani oleh Presiden sendiri dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim. Semua pemimpin yang berada di Istana negara ditawan oleh pemerintah Belanda. Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta untuk meneruskan perang gerilya. Menteri-menteri Susanto Tritoprojo, IJ.Kasimo dan Lukman Hakim berhasil meloloskan diri dan ikut serta dalam melaksanakan perang gerilya. Sebagian pemimpin-pemimpin yang lain menyerahkan diri dengan tujuan untuk dapat selalu berhubungan dengan Komisi Tiga Negara, sehingga perjuangan politik dan perjuangan fisik dapat dilaksanakan.<sup>43</sup>

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 24 Desember 1948 mengeluarkan resolusi yang isinya agar gencatan senjata segera dilaksanakan dan para pemimpin RI segera dibebaskan. Tetapi pihak Belanda

---

<sup>42</sup> Uraian secara sistematis mengenai PDRI bisa dilihat dalam Mestika Zed. *Somewhere in the jungle. Pemerintah Darurat Republik Indonesia; Sebuah Mata rantai Sejarah yang terlupakan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

---

<sup>43</sup> Mukayat. *Haji Agus Salim.*, hlm. 80

tidak mau melaksanakan resolusi itu, akibatnya pada tanggal 20 Januari 1949 Dewan Keamanan mengeluarkan resolusinya yang lebih keras dan lebih terperinci, sehingga terpaksa wakil Belanda menyerah, tetapi tetap menghindarkan pelaksanaan resolusi itu. Sebelum Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi 28 Januari 1949, perdanan menteri Nehru dari India berhasil mengadakan konperensi yang dihadiri oleh 21 negara dan konperensi itu terkenal dengan nama konperensi New Delhi. Isi konperensi itu sangat menguntungkan Indonesia, karena desakan-desakan dari dari dewan keamanan dan opini dari negara-negara Islam di Timur Tengah serta Konperensi New Delhi terpaksa Belanda mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia yang pada akhirnya lahirlah persetujuan Roem-Royen, itulah Yogyakarta kembali ke tangan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1949 tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta dan pada tanggal 30 Juni 1949 adalah hari bahagia bagi seluruh rakyat Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juli 1949 presiden Sukarno, wakil presiden Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dan lain-lain pemimpin RI kembali ke Yogyakarta.<sup>44</sup>

Setelah konfrensi antar Indonesia maka pada tanggal 23 Agustus 1949

lahirlah konperensi Meja Bundar di Den Haag. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Mohammad Hatta termasuk di antaranya Haji Agus Salim. Pada tanggal 29 Oktober 1949 telah ditandatangani piagam persetujuan tentang Konstitusi RIS dan pada tanggal 16 Desember 1949 dilangsungkan pemilihan Presiden untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta yang dilakukan oleh wakil-wakil dari 16 Negara Bagian. Pilihan jatuh pada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, akhirnya pada tanggal 30 Desember 1949 pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat.<sup>45</sup>

Demikian alur peristiwa dalam memperoleh pengakuan internasional atas kedaulatan bangsa Indonesia, hingga perundingan di Den Hag Belanda tahun 1949 yang pada akhirnya mengakui secara *de Jure* kemerdekaan Indonesia, walaupun beberapa kesepakatan didalamnya terasa sangat kontroversial. Tapi yang jelas Indonesia diakui baik secara *de facto* maupun secara *de jure* akan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam memperoleh pengakuan kedaulatan atas kemerdekaan bangsa Indonesia di dunia Internasional ini, hingga berakhirnya agresi pertama hingga meletusnya agresi kedua, kita telah melihat peran yang tidak ada absen dari sosok Hadji Agus salim.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm . 81

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

Perjuangan lebih kurang 3 tahun (1946-1949) telah cukup melelahkan kerajaan Belanda, dan telah membuat sebagian besar negara-negara di dunia mengakui kedaulatan Indonesia dan menyokong atas pengakuan kedautan tersebut secara Internasional.

### Hadji Agus Salim di akhir hayatnya

Pada tahun 1950, Hadji Agus Salim tidak lagi menjabat menteri luar negeri, karena mengingat usianya yang lanjut. Beliau menjadi penasihat ahli menteri luar Negeri hingga wafatnya.<sup>46</sup> Di sisi lain menarik untuk menyoroiti akhir hayat dari Haji Agus Salim dalam mengakhiri hidupnya dengan penuh makna, ini dibuktikan dari tiga tema kumpulan tulisan yang beliau sampaikan sepanjang tahun 1952-1953, tulisan-tulisan tersebut mencerminkan apa yang ada dalam pikirannya di akhir hayatnya. Pada bagian ini secara ringkas akan dikupas tiga tema tulisan tersebut dalam satu kesatuan makna, untuk kemudian mengambil sari kesimpulan bagaimana Haji Agus Salim di akhir hayatnya.

Tulisan *pertama* tentang Kebudayaan.<sup>47</sup> Tulisan Agus Salim tentang

kebudayaan ini bisa menjadi bahan cerminan bagaimana ia (Hadji Agus Salim) memahami dirinya dan lingkungannya. Karena sejatinya bicara kebudayaan itu adalah bicara bagaimana kedirian yang tumbuh dalam lingkungannya. Setidaknya ada 6 point penting yang di garisbawahi oleh Agus Salim dalam tulisannya tentang kebudayaan ini. *Pertama*, ia memaknai kebudayaan merupakan pancaran satu kesatuan makna antara budi (akal, pikiran, pengertian, paham, pendapat, ichtiar, perasaan) dan daya (tenaga, kekuatan, kesanggupan).<sup>48</sup> *Kedua*, dari kesatuan budi dan daya tadi melahirkan gerak-gerik di dalam alam tabiat.<sup>49</sup> *Ketiga*, budi dan daya tadi tidak datang dengan sendirinya, tapi berawal dari roh yang dihembuskan dalam diri manusia (wa na facha fih min Ruchihi, QS As Sadjdah ayat 9).<sup>50</sup> *Keempat*, Adanya fitrah manusia untuk menyadari keesaan kekuasaan yang ada diluar dirinya, ketika mendapati kelemahan-kelemahan dirinya.<sup>51</sup> *Kelima*, adanya ajaran dalam teks kitab suci al-qur'an yang berdampak pada revolusi kebudayaan yaitu ajaran pemberantasan buta huruf. Kata Agus Salim "*Semua*

<sup>46</sup> John Coast. Haji Agus Salim seorang Diplomat. Dalam Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim. *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

<sup>47</sup> Haji Agus Salim. Agama dan Kebudayaan. Dalam Panitia Peringatan 70 tahun Haji Agus Salim. *Djedjak Langkah Hadji A. Salim*,

*Pilihan Karangan Utjapan dan Pendapat Beliau Dari Dulu Sampai Sekarang*. Djakarta: Tintamas, 1954., hlm 299-322.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 300

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 302

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 302-303

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 308

orang yang agak berpengetahuan biarpun sedikit saja tentang Qur'an dan agama Islam, telah mendengar bahwa kata pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Saw ialah perintah menyuruh dia membaca: Iqra'." <sup>52</sup> Keenam, adanya ajaran Qur'an tentang persamaan hukum, persamaan hak dan kewajiban atas segala manusia, dengan tidak membedakan pangkat derajat karena turunan jabatan. <sup>53</sup> Hukum persamaan itu, yang menghapuskan pembagian manusia atas tingkatan turunan (klas dan kasta). <sup>54</sup>

Tulisan kedua, mengenai keterangan Filsafat tentang tauhid, taqdir dan tawakkal. Tulisan ini terbit pada bulan Februari 1953. Bila tulisannya tentang kebudayaan bisa dimaknai mengenai bagaimana persepsinya terhadap lingkungannya, maka tulisannya mengenai keterangan filsafat tentang tauhid, taqdir dan tawakkal, adalah bagaimana ia memahami tentang keesaan kekuatan yang ada di luar dirinya dan lingkungannya. Dalam tulisannya tersebut, Agus Salim memaparkan bahwa adanya keunggulan berfikir yang dimiliki oleh makhluk manusia untuk memahami makna kebendaan (materialisme), dan makna berdasar faham fikiran (idealisme). Dalam pemahaman selanjutnya bahwa kejadian-

kejadian yang ada yang dialami manusia memerlukan suatu rumusan tentang makna khusus, itulah yang diringkaskan oleh Agus salim dengan tiga kata yaitu : tauhid, taqdir dan tawakkal.. <sup>55</sup>

Tulisan ketiga, yaitu *Pesan-Pesan Islam*. <sup>56</sup> Tulisan ini merupakan kumpulan bahan-bahan perkuliahan yang disampaikan Haji Agus Salim di Cornell University sepanjang tahun 1953. Pada tahun 1953 ini, Haji Agus Salim pergi ke Amerika Serikat untuk memenuhi undangan dari Cornell University di Ithaca di mana ia berfungsi sebagai guru besar luar biasa dalam mata kuliah "Pergerakan dan Cita Islam Indonesia". Apabila dua tulisan sebelumnya yaitu tentang kebudayaan dan keterangan filsafat mengenai tauhid, taqdir, dan tawakkal, berbicara seputar pemahaman tentang kedirian yang tumbuh dalam lingkungannya dan pemahaman akan keesaan kekuatan di luar diri manusia. Maka Tulisan-tulisan Agus Salim yang tergabung dalam buku *Pesan-Pesan Islam* ini merupakan cerminan bagaimana pemahaman Agus Salim mengenai hubungan segitiga itu diatur.

---

<sup>55</sup> Lihat Haji Agus Salim. Keterangan Filsafat tentang Tauhid, Taqdir dan Tawakkal. Dalam Panitia Peringatan 70 tahun Haji Agus Salim. *Djedjak Langkah Hadji A. Salim, Pilihan Karangan Utjapan dan Pendapat Beliau Dari Dulu Sampai Sekarang*. Djakarta: Tintamas, 1954., hlm 329-385.

<sup>56</sup> Lihat Haji Agus Salim. *Pesan-Pesan Islam; Rangkaian Kuliah Musim Semi 1953 di Cornell University Amerika serikat*. Bandung: Mizan, 2011

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 308

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 317

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 318



Pada akhir tahun 1953 Haji Agus Salim kembali ke Indonesia. Berencana akan mengabdikan sepenuhnya di bidang pendidikan, sebagai guru besar bidang da'wah di PTAIN Yogyakarta. Pada tahun berikutnya 1954 ia berulang tahun yang ke-70 pada tanggal 8 Oktober, ketika itu Agus Salim telah mulai sakit-sakitan dan harus banyak istirahat.<sup>57</sup> Akhirnya satu bulan kemudian, tepatnya tanggal 4 Nopember 1954, Hadji Agus Salim meninggalkan dunia yang fana ini untuk selamanya.

## Penutup

Setelah di bagian awal dari tulisan ini mencoba melihat peranan Haji Agus Salim, tulisan ini kemudian lebih memfokuskan pada peran-peran penting yang dimainkan oleh Agus Salim di awal kemerdekaan. Satu diantaranya adalah peran Haji Agus Salim dalam mengiringi perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan dari kerajaan Belanda dan dunia Internasional akan kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim adalah sosok yang nyaris tidak pernah absen dalam perundingan-perundingan yang digelar. Kemudian Pada bagian akhir dari tulisan ini, mencoba menangkap spirit yang dimiliki oleh Agus Salim melalui tiga rangkaian terakhir dari tulisan-tulisan

diakhir hayatnya.<sup>58</sup> Dari tiga rangkaian tulisan tersebut disimpulkan bahwa dibalik ketangkasan Haji Agus Salim ada spirit yang memancar dari pemahaman Islam yang komprehensif yang ia miliki dalam merespon apa-apa yang terjadi atas dirinya dalam berhadapan dengan situasi di luar dirinya.

## Daftar Bacaan

- Agus Salim. *Pesan-Pesan Islam*. Bandung: Mizan, 2011
- Ahimsa-Putra, H.S. *Kajian Patron-Klien: Dari Fungsional-Struktural ke Actor Oriented*. Dalam *Patron & Klien di Sulawesi Selatan Sebuah kajian Fungsional-Struktural*. Yogyakarta: Kepel Press, 2007
- Agustinus Supriyanto. *Pengakuan Kerajaan Belanda Dalam Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia Tahun 1945-1949*. Disertasi, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum UGM. Agustus 2007.
- Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional, 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983
- . *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, Cet kedelapan Mei 1996

<sup>57</sup> Kustiniyati Mochtar, *Agus Salim*, hlm 92.

<sup>58</sup> Lih. Haji Agus Salim. *Agama dan Kebudayaan*. Dalam Panitia Peringatan 70 tahun Haji Agus Salim. *Djedjak Langkah Hadji A. Salim, Pilihan Karangan Utjapan dan Pendapat Beliau Dari Dulu Sampai Sekarang*. Djakarta: Tintamas, 1954. Lihat Pula Haji Agus Salim. *Keterangan Filsafat tentang Tauhid, Taqdir dan Tawakkal*. Dalam Panitia Peringatan 70 tahun Haji Agus Salim. *Djedjak Langkah Hadji A. Salim, Pilihan Karangan Utjapan dan Pendapat Beliau Dari Dulu Sampai Sekarang*. Djakarta: Tintamas, 1954. dan Haji Agus Salim. *Pesan-Pesan Islam; Rangkaian Kuliah Musim Semi 1953 di Cornell University Amerika Serikat*. Bandung: Mizan, 2011.,

- Elizabeth E. Graves. *Asal Usul Elit Minangkabau Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Jeffrey Hadler. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute, 2010
- Mukayat. *Haji Agus Salim*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981
- Panitia Peringatan 70 tahun Haji Agus Salim. *Djedjak Langkah Hadji A. Salim, Pilihan Karangan Utjapan dan Pendapat Beliau Dari Dulu Sampai Sekarang*. Djakarta: Tintamas, 1954.
- Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim. *Seratus Tahun Haji Agus Salim*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984
- Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Robert F. Berkhofer, *Behavioral Approach To Historical Analysis*. New York: The Free Press, 1969
- Solichin Salam. *Hadji Agus Salim: Hidup dan Perjuangannya*. Djakarta: Penerbit Djajamurni, 1961
- St. Sularto (ed). *Haji Agus Salim (1884-1954) Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*. Jakarta: Penerbit Gramedia, 2004
- Tamar Djaja, “ Hadji Agus Salim”, dalam *Pusaka Indonesia. Riwayat Hidup Orang2 Besar Tanah Air*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966, pp 789-808.
- Yudi Latif. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia abad ke-20*. Bandung: Penerbit Mizan, 2005
- Majalah Gatra Edisi Khusus Kemerdekaan Agustus 2012. Tokoh Lintas Agama Perumus Indonesia.